

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pengangguran masih menjadi salah satu masalah paling berat di dunia. Menurut world population review tingkat pengangguran di dunia mencapai 6,3% - 6,5% atau sekitar 207 juta orang. Afrika selatan masih menjadi negara dengan tingkat pengangguran terbanyak di dunia, dimana tingkat pengangguran di negara tersebut mencapai 29,2%.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pengangguran juga masih menjadi salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang atau pada persentase 5,86%. Angka itu menurun dari 6,49% atau lebih tepatnya berkurang sekitar 680 ribu orang dibandingkan agustus tahun 2021. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Februari 2022 maka jumlahnya naik sekitar 20 ribu orang atau rasionya naik 0,03%.

Menurut data dari *trading economics* Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengangguran terbanyak dari 24 negara di Asia, dengan jumlah pengangguran mencapai 8.425.931 orang. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pengangguran dari 24 Negara di Asia

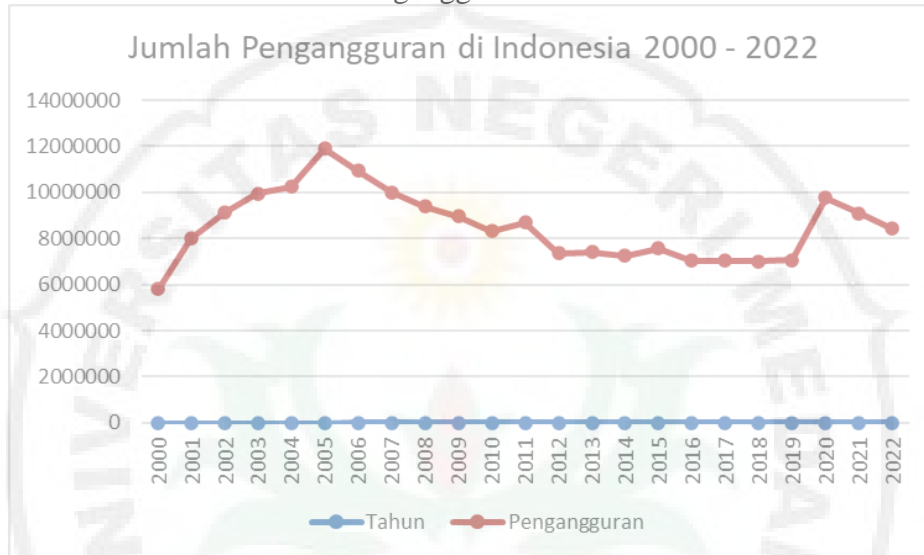
Peringkat	Negara	Jumlah Pengangguran
1	Indonesia	8.425.931
2	Filipina	2.373.000
3	Jepang	1.800.000
4	Uzbekistan	1.442.000
5	Vietnam	1.050.000
6	Korea Selatan	782.000
7	Malaysia	592.000
8	Thailand	462.000
9	Kazakhstan	456.000
10	Taiwan	420.000
11	Sri-Lanka	419.163
12	Palestina	354.700
13	Azerbaijan	316.000
14	Georgia	250.000
15	Yordania	237.300
16	Israel	174.000
17	Hong Kong	116.000
18	Singapura	98.000
19	Kirgistan	75.800
20	Mongolia	68.126
21	Tajikistan	53.500
22	Armenia	48.200
23	Macau	12.800
24	Brunei	10.956

Sumber : *trading economics 2022*

Pada table di atas dapat kita lihat bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dari 24 negara di Asia. Maka dari itu Indonesia masih menjadi negara yang sangat tertinggal dalam mengatasi tingkat pengangguran khususnya di regional Asia. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah, jika jumlah pengangguran dapat diturunkan salah satu manfaatnya adalah bertambahnya pendapatan perkapita dikarenakan seseorang yang bekerja akan mendapatkan penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Dalam kurun waktu 2000 – 2022 jumlah pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi atau naik turun, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pengangguran di Indonesia Periode 2000 - 2022



Sumber : BPS 2023

Pada grafik tersebut terlihat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia tidak cenderung turun seperti yang diharapkan, namun terjadi fluktuasi atau naik turun dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2019 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,05 juta orang dan naik sebesar 2,72 juta orang pada tahun 2020 menjadi 9,77 juta orang. Kenaikan yang melebihi 2 juta orang juga terjadi pada tahun 2001, dimana sebelumnya pada tahun 2000 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,8 juta orang kemudian naik sekitar 2,2 juta orang pada tahun 2001 sehingga mencapai 8 juta orang. Selain terjadi peningkatan selama kurun waktu 2000 – 2022 juga terjadi penurunan jumlah pengangguran. Penurunan tertinggi jumlah pengangguran di Indonesia terjadi pada tahun 2012, dimana pada tahun sebelumnya yaitu 2011, jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 8.681.392 kemudian menurun sebesar 1.336.526 sehingga jumlah

pengangguran di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 7.344.866. Hal ini tentunya yang diharapkan adalah jumlah pengangguran terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bukan seperti data yang ditunjukkan grafik pada gambar 1.1 dimana pada periode 2000 – 2022 jumlah pengangguran mengalami penurunan yang tidak konsisten dengan kata lain terjadi fluktuasi.

Rahardja (2008) mendefinisikan pengangguran yaitu angkatan kerja yang tidak menemukan lapangan kerja. Salah satu penyebab angkatan kerja tidak dapat menemukan lapangan kerja menurut Ahmad (2020) adalah Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta mengenyam pendidikan yang rendah.

Sebagai salah satu penyebab angkatan kerja tidak dapat menemukan lapangan kerja, maka pendidikan menjadi sektor penting yang harus diperhatikan dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran. Maka dalam operasionalnya, pendidikan memerlukan alokasi dana dari pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Indonesia mengalokasikan 20% dari anggaran belanja negara terhadap sektor pendidikan. Yang dimana pada tahun 2022 angkanya mencapai 621,3 triliun rupiah.

Semakin besar alokasi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah ke sektor pendidikan, maka akan membuat pembangunan di sektor pendidikan semakin baik dengan fasilitas yang memadai untuk dapat menghasilkan lulusan yang akan menjadi angkatan kerja yang mempunyai skill yang mumpuni dalam masing – masing bidang pekerjaan. Dan tentunya dengan skill yang mumpuni akan memudahkan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan supaya tidak menganggur.

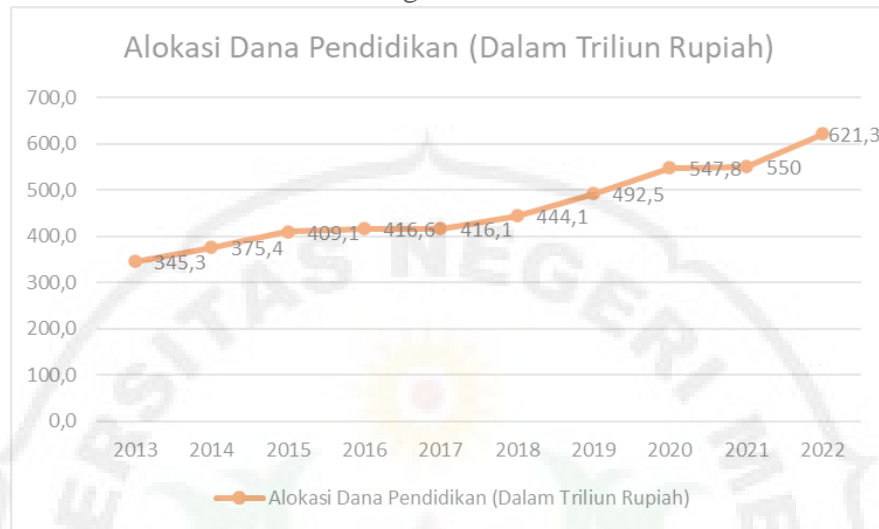
Menurut BPS (2023) Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. Di daerah alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana alokasi pendidikan berdasarkan data Kementerian keuangan (2023) dialokasikan pada:

1. Belanja pemerintah pusat yaitu: Program Indonesia Pintar dan tunjangan profesi guru non PNS
2. Transfer ke daerah yaitu: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
3. Dana abdi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi dan kebudayaan.

Manfaat dari pengeluaran ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing bangsa. Dukungan sumber daya yang terus meningkat dan berkelanjutan merupakan dengan penggunaan yang lebih efektif dan efisien merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan data dari kementerian keuangan, dalam 10 tahun terakhir alokasi dana pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui APBN cenderung mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut :

Gambar 1.2. Grafik Alokasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan



Sumber : Kementerian Keuangan 2023

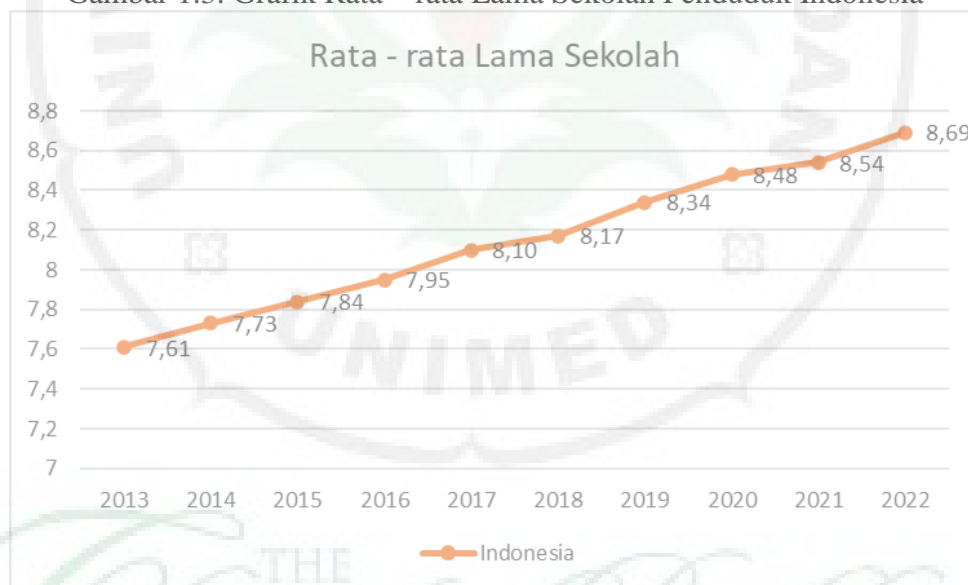
Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam 10 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya saja pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,5 triliun atau 500 miliar rupiah dari tahun 2016. Namun terdapat gap atau perbedaan dimana hal tersebut terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dari tahun 2019 namun jumlah pengangguran yang diharapkan menurun pada tahun 2020 justru meningkat. Namun hal ini dikarenakan terjadinya pandemi covid – 19. Namun ternyata gap tidak hanya terjadi pada tahun 2020, melainkan juga terjadi pada tahun 2015 dimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami peningkatan namun jumlah pengangguran yang diharapkan menurun malah mengalami kenaikan.

Selain alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor dari pengangguran seperti yang disampaikan oleh Ahmad (2020). Tingkat pendidikan dapat direpresentasikan oleh rata – rata lama sekolah. Menurut BPS (2023) rata-rata lama sekolah didefinisikan

sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata – rata lama sekolah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.3. Grafik Rata – rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia



Sumber : BPS 2023

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, rata – rata lama sekolah mencapai angka 8,69 tahun, yang dimana berarti rata – rata tingkat pendidikan penduduk Indonesia tidak menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) padahal pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun.

Johar (2023) dalam penelitian yang berjudul “Hubungan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Jumlah pengangguran: Mediasi Laju Pertumbuhan Ekonomi”

menyatakan bahwa rata – rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini berarti semakin tinggi rata – rata lama sekolah maka tingkat pengangguran semakin rendah. Tingkat pengangguran yang rendah tentu karena jumlah pengangguran yang rendah karena jumlah pengangguran sendiri merupakan pembilang dari tingkat pengangguran. Individu dengan lama sekolah yang lebih tinggi artinya tingkat pendidikannya semakin tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi tentunya didukung oleh keterampilan dan kompetensi yang tinggi sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam mencari pekerjaan dan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Hubungan negatif antara rata – rata lama sekolah dengan jumlah pengangguran ternyata terdapat gap dengan data yang ada, dimana pada tahun 2020 rata – rata lama sekolah di Indonesia mengalami peningkatan dari 8,34 tahun menjadi 8,48 tahun, namun justru jumlah pengangguran pada tahun tersebut juga meningkat. Tidak hanya pada tahun 2020, gap tersebut juga terdapat pada tahun 2015, dimana rata – rata lama sekolah meningkat dari 7,73 tahun dari 2014 menjadi 7,84, namun jumlah pengangguran justru meningkat dari 7,2 juta orang pada tahun 2014 menjadi 7,5 juta orang pada tahun 2015.

Oliviani (2023) menyatakan bahwa pengangguran terjadi karena tidak seimbangnya antara tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja sangat bergantung pada permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan produksi guna memenuhi permintaan barang dan jasa dari konsumen. Sukirno (2013) mengutip teori Keynes yang menjelaskan bahwa

masalah pengangguran timbul disebabkan oleh adanya permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat merupakan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian.

Daya beli penduduk akan bahan-bahan pokok jenis makanan atau non-makanan ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk. Borjas (2016) menyatakan bahwa dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja, konsumsi penduduk terhadap barang dan jasa akan membuat perusahaan memproduksi barang lebih banyak dan berdampak pada penambahan input produksi berupa tenaga kerja yang digunakan. Dengan begitu, permintaan tenaga kerja akan naik seiring dengan tingginya daya beli masyarakat karena perusahaan akan cenderung menambah jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam pemenuhan permintaan barang dan jasa dari konsumen sehingga angka pengangguran juga menurun.

Pengeluaran riil perkapita sendiri merupakan indikator yang mempresentasikan dimensi standar hidup layak dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dikarenakan pengeluaran riil per kapita merupakan tolak ukur dimensi standar hidup layak yang digunakan dalam perhitungan IPM yang dimana pengeluaran riil perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana yang disimpulkan oleh Rohimah (2019) dalam penelitiannya, maka peneliti menduga ada hubungan negatif dan signifikan yang ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita terhadap jumlah pengangguran, sebagaimana hubungan antara IPM dengan jumlah pengangguran. Hal ini sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh Mahroji Dwi (2019) bahwa

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative signifikan terhadap jumlah pengangguran. BPS (2023) mendefinisikan pengeluaran riil per kapita sebagai biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Pengeluaran riil perkapita penduduk Indonesia sendiri pada tahun 2022 mencapai Rp 11.479.000,- yang meningkat sebesar Rp 323.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam sepuluh tahun terakhir pengeluaran riil per kapita penduduk Indonesia cenderung meningkat seperti yang terlihat pada grafik berikut :

Gambar 1.4. Grafik pengeluaran riil per kapita penduduk Indonesia



Sumber : BPS 2023

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir hanya terjadi satu kali penurunan pengeluaran riil perkapita yaitu terjadi pada tahun 2020 menjadi Rp 11.013.000,- dari yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp 11.299.000,- , hal ini mungkin saja akibat dari pandemi covid 19 yang mewabah di seluruh dunia termasuk di tanah air. Yang dimana karena hal tersebut masyarakat

mengurangi pengeluarannya guna menjaga kondisi keuangan akibat pembatasan sosial dan kondisi ekonomi yang menurun pada saat pandemi.

Secara kasat mata kenaikan angka yang dapat dilihat pada grafik dari tahun 2021 ke 2022 tentu sudah meningkat cukup baik. Namun jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2018 yang meningkat dari tahun 2017 sebesar Rp 395.000,- tentu peningkatan ditahun 2022 masih lebih rendah. Hal ini tentu menjadi perhatian supaya pemerintah dapat menemukan cara untuk meningkatkan pengeluaran rill perkapita penduduk yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Hubungan negatif antara pengeluaran rill perkapita dengan jumlah pengangguran ternyata mengalami gap pada tahun 2015 dimana pengeluaran rill perkapita mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 247.000,- sehingga pada tahun 2015 menjadi Rp 10.150.000,- , namun jumlah pengangguran juga mengalami kenaikan pada tahun tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin mengerahui hubungan jumlah pengangguran dengan faktor – faktor yang diduga mempengaruhinya seperti pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran rill perkapita. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Rata – Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Perkapita Terhadap Jumlah Pengangguran Di Indonesia Periode 2000 – 2022”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Jumlah pengangguran yang harusnya mengalami konsistensi penurunan tetapi berdasarkan data jumlahnya mengalami fluktuasi
2. Rata – rata lama sekolah di Indonesia yang masih belum memenuhi program wajib belajar pemerintah yaitu 9 tahun
3. Kenaikan pengeluaran riil perkapita penduduk Indonesia yang masih rendah

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita terhadap jumlah pengangguran di Indonesia dalam kurun waktu 2000 - 2022.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap jumlah pengangguran di Indonesia periode 2000 - 2022?
2. Apakah terdapat pengaruh rata – rata lama sekolah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia periode 2000 - 2022?
3. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran riil per kapita terhadap jumlah pengangguran di Indonesia periode 2000 - 2022?
4. Apakah terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita secara simultan terhadap jumlah pengangguran di Indonesia periode 2000 - 2022?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap jumlah pengangguran di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang
2. Untuk mengetahui pengaruh rata – rata lama sekolah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran riil per kapita terhadap jumlah pengangguran di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita secara simultan terhadap jumlah pengangguran di Indonesia pada jangka pendek dan jangka panjang

1.6. Pemecahan Masalah

Setelah mengetahui pengaruh dari masing – masing penyebab pengangguran, maka untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia adalah dengan meningkatkan nilai dari variabel independen yaitu Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Rata – rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Rill Perkapita. Dikarenakan dugaan dari penelitian ini pengaruh variabel independen dengan variabel dependen adalah berhubungan negatif.

1.7. Manfaat Penelitian

1. Memberikan tambahan pengetahuan wawasan serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana bagi peneliti.
2. Memberikan peranan sebagai mahasiswa dalam tri dharma perguruan tinggi bagi Universitas Negeri Medan
3. Dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan guna mengurangi jumlah pengangguran bagi pemerintah.

